



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : www.dishub@singkawangkota.go.id Pos-el : Dishub@singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 500.12.1/22/Set-01 TAHUN 2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SINGKAWANG**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

14. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang,
pada tanggal 17 Juli 2025

Kepala Dinas,



EKO SUSANTO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760122 200312 1 007

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang.
Nomor 500.12.1/22/Set-01 TAHUN 2025
Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan
Dinas Perhubungan Kota Singkawang
Tanggal 17 Juli 2025

| NO. | Ringkasan Isi Informasi | Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD) | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | | Keterangan |
|----------|---|--|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| | | | | Soft copy | Hard copy | |
| A | Informasi Yang Berkaitan Dengan Badan Publik | | | | | |
| | Mengumumkan informasi berupa deskripsi tentang nama, alamat, struktur organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku dan disediakan melalui website Badan Publik dan PPID | | | | | |
| 1 | Profil Badan Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| | Mengumumkan informasi LHKPN Pejabat Daerah yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK untuk disediakan/diumumkan pada website Badan Publik dan PPID (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari : | | | | | |
| | a. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di Lingkungan Badan Publik | PPID Pelaksana | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | b. Mengumumkan informasi jumlah dan presentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Badan Publik (bukan website KPK) | PPID Pelaksana | Tahun n-1 | √ | √ | |
| B | Informasi tentang program dan/atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi | | | | | |
| 1 | Mengumumkan program atau kegiatan (DPA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana program, sumber anggaran, besaran anggaran. | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 2 | Mengumumkan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan (Evaluasi RENJA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan | PPID Pelaksana | Tahun n-1 | √ | √ | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|--------------------|---|---|--|
| 3 | Mengumumkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan (LAKIP) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan | | Tahun n-1 | √ | √ | |
| 4 | Rencana Strategik Badan Publik | | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| C | Laporan Keuangan | | | | | |
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | PPID Pelaksana | Tahun n-1 | √ | √ | |
| 2 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | PPID Pelaksana | Tahun n-1 | √ | √ | |
| 3 | Daftar Aset dan Inventaris | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 4 | Neraca | PPID Pelaksana | Tahun n-1 | √ | √ | |
| 5 | Ringkasan RKA OPD | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 6 | Ringkasan DPA OPD | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 7 | Informasi realisasi atau penyerapan anggaran (RFK) | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| D | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | |
| | Menyediakan Lima (5) dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diaudit/verifikasi | | | | | |
| I | Tahap Perencanaan, meliputi : | | | | | |
| | 1. Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP | PPID Pelaksana | Tahun n-1 | √ | √ | |
| II | Tahap Pemilihan, meliputi : | | | | | |
| | 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 3. Spesifikasi Teknis | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 4. Rancangan Kontrak | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 7. Daftar Kuantitas dan Harga; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 8. Jadwal Pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 9. Gambar Rancangan Pekerjaan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|---|---|--|
| | 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 11. Dokumen Penawaran Administratif | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 12. Surat Penawaran Penyedia | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 15. Beritas Acara Pengumuman Negosiasi | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | Menyediakan dokumen Surat-Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | | | | | |
| | 20. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsi Badan Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| | 21. Surat Perjanjian Swakelola | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| III | Tahap Pelaksanaan, meliputi : | | | | | |
| | 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 2. Surat Perintah Mulai Kerja | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 3. Surat Jaminan Pelaksanaan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 4. Surat Jaminan Uang Muka | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 5. Surat Jaminan Pemeliharaan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 6. Surat Tagihan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 7. Surat Pesanan E-purchasing | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 8. Surat Perintah Membayar | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 9. Surat Perintah Pencairan Dana | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|--------------------|---|---|--|
| | 10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 13. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| | 14. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over | PPID Pelaksana (PPK) | Tahun n-1 | √ | √ | |
| E | Informasi Terbuka Lainnya | | | | | |
| | Mengumumkan Ringkasan Tentang Laporan Akses Informasi Publik (Laporan PPID) yang memuat tentang : | | | | | |
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 3 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 4 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| | Mengumumkan Prosedur Pelayanan akses Informasi Publik yang dapat disediakan berupa Poster/Pengumuman/Infografis di Website PPID dan/atau media sosial Badan Publik | | | | | |
| 5 | Tata cara memperoleh informasi publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 6 | Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 7 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 8 | Tata cara atau prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| A | Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan | | | | | |
| 1 | Profil pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK) | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 2 | Data statistic sektoral yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| 3 | Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh Badan Publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | |
| B | Informasi peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|--------------------|---|---|--|
| 1 | Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | Disajikan dalam bentuk MATriks Tabel sekurang-kurangnya memuat informasi tentang Nomor, Judul Draft, Status |
| 2 | Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau diterapkan | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | Disajikan dalam bentuk MATriks Tabel sekurang-kurangnya memuat informasi tentang Nomor, Judul Draft, Status |
| C | Informasi Setiap Saat Lainnya | | | | | |
| 1 | Menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan aau pejabat Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | Informasi berupa Pengumuman/Surat Edaran |
| A | Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum | | | | | |
| 1 | Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik | PPID Pelaksana | Tahun Berjalan (n) | √ | √ | Informasi berupa Pemadam Listrik, PDAM, Gangguan Jaringan Internet, Pengalihan Arus Lalu Lintas dan lain lain. |

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang



EKO SUSANTO, S.T., M.T.

Rebubina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760122 200312 1 007

